

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2013). *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: : PT. Rineka Cipta.
- Awan, A. G., & Hannan, A. (2014). The Determinants of Tax Evasion in Pakistan: A case study of Southern Punjab. *International Journal of Development and Economic Sustainability*.
- Brotodihardjo, S. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Cangara, H. (1998). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carmelo Ferlito, H. R. (2019). Reformasi Kebijakan pada Industri Unggas di Indonesia. *Neliti*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2015*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2016*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2017*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2018*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2019*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan Tahunan DJP Tahun 2020*. Jakarta.
- Dirjosisworo, S. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Avasion. *Accounting Analysis Journal*.
- Goldratt. (2014). Adopt A New Approach To Business Management. *Theory Of Constraints*.
- Hartono. (2010). *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Dokumen Lengkap Visi Indonesia 2045*. Jakarta.
- Kharisma, T. (2019). Penerapan Manajemen Humas Digital dalam Komunikasi Publik di Instansi Arsip Nasional Republik Indonesoa. *Jurnal Media dan Komunikasi*.

- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behavior*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., & Muehlbacher, S. (2012). Combining Psychology and Economics in the Analysis of Compliance: From Enforcement to Cooperation. *Economic Analysis & Policy*.
- Kurniawati, A., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2021). *Distribusi Simpanan Bank Umum*. Jakarta.
- Liyana, F., & Riyanto, E. (2019). *Praktikum Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Madjid, O., & Kalangi, L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Jurnal EMBA* 478.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: ANDI.
- Menteri Keuangan. (2008). Peraturan menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Jakarta.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurlan, D. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Grammedia Anggota IKAPI.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Pemerintah Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta.
- Porf. Dr. Mardiasmo, M. A. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. ANDI.
- Pratiwi, N. A. (2021). Tinjauan Penagihan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Jember. *KTAA PKN STAN*.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Ke-Enam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusdji, M. (PPSP : Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa). 2004. Jakarta: PT. Indeks.
- S.L, I., & Amir, A. (2016). Analisis Struktur Pajak dan Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*.
- Soebakir. (1999). *Petunjuk Praktis Perpajakan*. Jakarta: Berita Pajak.
- Soemitro, R. (1979). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*. Jakarta: PT. Eresco Bandung.
- Suardana, K. W. (2019). Tinjauan Mekanisme Pemblokiran dan Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank di KPP Pratama Gianyar. *KTAA PKN STAN*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistiyanto, H. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *Jurnal Perspektif*.
- Wahdi, & Danang. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.

- Wijatno, S. (2009). *Pengantar Entrepreneurship*. Jakarta: Grasindo.
- Wirawan, A. S. (2021). Tinjauan Atas Pelaksanaan Penagihan AKtif Berupa Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Sati. *KTТА PKN STAN*.
- Zhavira, F. (2021). Tinjauan atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan sebagai Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Aceh Besar. *KTТА PKN STAN*.
- Zhavira, F. (2021). Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan sebagai Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Aceh Besar. *KTТА PKN STAN*.
- Zuraida, I., & Advianto, J. S. (2011). *Penagihan pajak : Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.